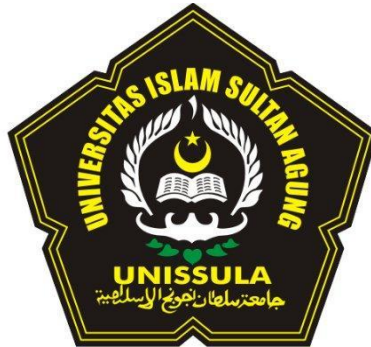


**ANALISIS KREDIT MACET DI PT BPR BKK JATENG (PERSERODA)
CABANG DEMAK
TUGAS AKHIR**



Disusun oleh:

Diny Eka Priany

NIM.49402100014

**PROGAM STUDI D-III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISIS KREDIT MACET DI PT BPR BKK JATENG (PERSERODA)
CABANG DEMAK**

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Akuntansi



Disusun oleh:

Diny Eka Priany

NIM.49402100014

**PROGAM STUDI D-III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

PERTANYAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diny Eka Priany
NIM : 49402100014
Program Studi : DIII Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir saya dengan judul:

“ANALISIS KREDIT MACET DI PT BPR BKK JATENG (PERSERODA) CABANG DEMAK”

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Semarang, 16 Mei 2024

Yang Menyatakan,



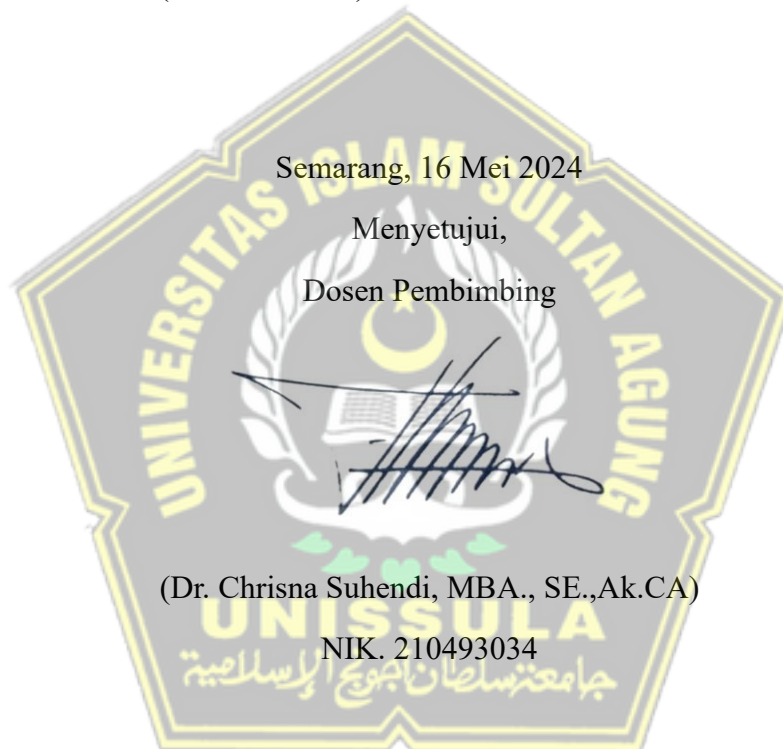
Diny Eka Priany

NIM.49402100014

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Diny Eka Priany
NIM : 49402100014
Program Studi : DIII Akuntansi
Judul Tugas Akhir : ANALISIS KREDIT MACET DI PT BPR BKK JATENG
(PERSERODA) CABANG DEMAK



HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh;

Nama : Diny Eka Priany

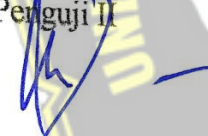
Nim : 49402100014

Program Studi : D-III Akuntansi

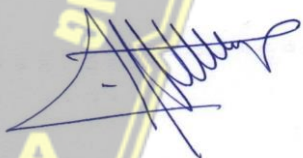
Judul Tugas Akhir : ANALISIS KREDIT MACET DI PT BPR BKK JATENG
(PERSERODA) CABANG DEMAK

Telah berhasil di pertahankan di hadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi pada program studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, Mei 2024
Penguji II



Dr. Zainal Akim Adiwijaya,
SE.,M.Si,Akt,CA
NIK. 211492005

Semarang, Mei 2024
Penguji I


Dr. Chrisna Suhendi, MBA.,
SE.,Ak.CA
NIK. 211496007

Mengetahui

Ketua program D-III Akuntansi
Fakultas Ekonomi Unissula


Akhmad Rudi Yulianto, SE.,M.Si Ak
NIK. 211415028

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah senantiasa saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi Rahmat dan hidayat-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Adapun tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan D-III Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penyusunan Tugas Akhir ini dilakukan dengan judul “ANALISIS KREDIT MACET DI PT BPR BKK JATENG (PERSERODA) CABANG DEMAK”

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan dan bimbingan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulisty, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Ahmad Rudi Yulianto. SE., M.Si. Selaku Ketua Progam Studi D-III Akuntansi Fakultas ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Chrisna Suhendi, MBA., SE., Ak.CA Selaku dosen pembimbing saya yang telah senantiasa meluangkan waktu, tenaga, serta kesediannya dalam membimbing, menasehati, dan memberikan arahan serta evaluasi terhadap laporan magang ini.
4. Bapak Dwi Edhi yulianto, SE Selaku Pimpinan BKK Kantor Kas Cabang Dempet yang telah memberi kesempatan, ilmu, serta pengalaman kepada penulis untuk melaksanakan program magang.
5. Mba verawati, Mba Balqis, Mba Anita dan Mba Ulin selaku karyawan kantor BKK cabang Dempet dan Rekan yang telah membantu dan memberikan ilmunya kepada penulis selama pelaksanaan magang.
6. Ibu dan bapak yang saya cintai, terimakasih sudah memberikan kasih sayang dengan tulus Terimakasih atas bekal, nasehat, motifasi serta doa kepada penulis sehingga penulis bisa sampai di titik ini berkat perjuangan keras beliau, beliau adalah alasan terbesar penulis, Terimakasih sudah menjadi orang tua yang sempurna.
7. Keluarga besar tercinta, khususnya kakak dan keluarga kecilnya terimakasih selalu ada, terimakasih telah memberikan semangat dan motifasi buat lulus dengan tepat waktu.
8. Erwin Renaldi, terimakasih sudah memberi semangat dan menemani penulis dengan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikannya
9. Teman-temanku tercinta D-III Akuntansi Angkatan 2021 khususnya Dwi Wulan septiandari dan Anggita Fernanda yang telah menemani serta memberi dukungan penuh kepada penulis.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir.

Juga semua pihak yang telah memberi semangat serta dukungan selama ini, yang tidak dapat disebut satu persatu. Mudah mudahan amal yang diberi kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah S.W.T. penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini tentu saja tidak lepas dari berbagai kesalahan dan kelemahan. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangatlah diharapkan agar laporan magang ini menjadi lebih baik. Akhir kata, Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi almamater khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 16 Mei 2024

Penyusun



Diny Eka Priany



ABSTRAK

Tugas Akhir ini bertujuan untuk menganalisis kredit bermasalah pada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dengan menggunakan rasio Non Performing Loan (NPL). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu statistik deskriptif dan metode analisis data kuantitatif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan Non Performing Loan (NPL). Berdasarkan hasil analisis deskriptif PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dari tahun 2019-2021, persentase kredit bermasalah yang terjadi pada tahun 2019 sebesar 7,91% kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi sebesar 26,08% dimana merupakan peningkatan NPL yang paling tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan matinya roda perekonomian masyarakat, sehingga debitur tidak bisa membayar angsurannya kepada bank. Sementara pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 19,28%. Berdasarkan grafik perkembangan NPL dari tahun 2019-2021 bahwa rata-rata persentase NPL masih melebihi standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5% sehingga kondisi perusahaan dapat dikategorikan tidak sehat.

Kata Kunci : Kredit Bermasalah, Rasio Non Performing Loan (NPL)



ABSTRACT

This research aims to overcome credit problems at PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Tegal Cash Office with a ratio using Non Performing Loans (NPL). The approach used in this research is descriptive statistics and quantitative data analysis methods. Data analysis was carried out using the Non Performing Loan (NPL) financial ratio. Based on the results of descriptive analysis of PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cash Office from 2019-2021, the percentage of non-performing loans that occurred in 2019 was 7.91%, then in 2020 it increased to 26.08%, which is an increase The highest NPL compared to previous years. This is due to the Covid-19 pandemic which has resulted in the shutdown of the community's economy, so that debtors cannot pay their installments to the bank. Meanwhile in 2021 it decreased to 19.28%. Based on the NPL development graph from 2019-2021, the average NPL percentage still exceeds the standard set by Bank Indonesia, namely 5%, so the company's condition can be categorized as unhealthy.

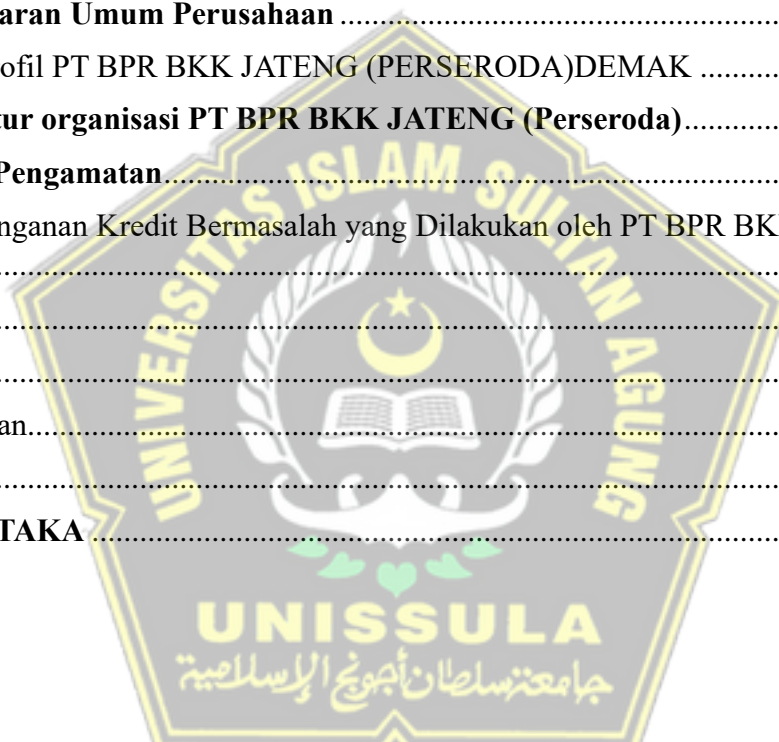
Keywords: Problem Loans, Non-Performing Loan (NPL) Ratio



DAFTAR ISI

PERTANYAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	3
1.3 Manfaat	3
BAB II	4
2.1 Bank	4
2.1.1 Pengertian Bank	4
2.1.2 Jenis-jenis Bank	4
2.1.3 Fungsi Bank	5
2.2 Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	6
2.2.1 Pengertian Perkreditan Rakyat.....	6
2.2.2 Fungsi dan Tujuan Bank Perkreditan Rakyat	6
2.2.3 Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat	6
2.3 Kredit	6
2.3.1 Pengertian kredit	6
2.3.2 Unsur Unsur Kredit.....	7
2.3.3 Tujuan dan Fungsi Kredit	8
2.3.4 Jenis-jenis Kredit	9
2.3.5 Analisis Kredit	11
2.3.6 Prosedur Pemberian Kredit	12
2.4 Kredit Bermasalah (Non Performing Laon)	12
2.4.1 Pengertian Kredit Bermasalah	12

2.4.2	<i>Rasio Non Performing Laon (NPL)</i>	13
2.4.3	Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah	13
BAB III	15
3.1	Jenis Penelitian	15
3.2	Objek Penelitian	15
3.3	Metode Pengumpulan Data	15
3.5	Metode Analisis Data	15
BAB IV	16
HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN		16
4.1	Gambaran Umum Perusahaan	16
4.1.1	Profil PT BPR BKK JATENG (PERSERODA)DEMAK	16
4.2	Struktur organisasi PT BPR BKK JATENG (Perseroda)	22
4.3	Hasil Pengamatan	26
4.3.1	Penanganan Kredit Bermasalah yang Dilakukan oleh PT BPR BKK Jateng (Perseroda)	31
BAB V	34
PENUTUP		34
4.1	Kesimpulan.....	34
4.2	Saran.....	37
DAFTAR PUSTAKA		38



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kriteria Penilaian Kualitas Rasio Non Performing Loan (NPL).....	13
Tabel 4 2 Data Kolektibilitas Kredit Tahun 2019.....	28
Tabel 4 3 Data Kolektibilitas Kredit Tahun 2020	28
Tabel 4 4 Data Kolektibilitas Kredit Tahun 2021.....	29
Tabel 4 5 Perbandingan Non Performing Loan (NPL) Tahun 2019-2021.....	30



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian suatu negara tidak terlepas dari peranan institusi keuangan, yaitu perbankan. Semua sektor kegiatan pasti membutuhkan jasa perbankan, baik lembaga pemerintah, badan usaha, swasta maupun orang pribadi. Pada era sekarang, masalah ekonomi masih menjadi kendala utama. Kebutuhan Masyarakat yang terus meningkat, tetapi kemampuan yang dimiliki sangatlah terbatas, sehingga terjadi ketimpangan antara kemampuan dan keinginan. Mengingat akan pentingnya kebutuhan tersebut, maka bank menjadi salah satu lembaga yang dapat membantu dalam permasalahan ini (Wulandary, 2015).

Perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat. Untuk itu, bank memberikan kesempatan kepada masyarakat yang mempunyai kelebihan dana (surplus spending unit) untuk disimpan di bank dalam bentuk simpanan seperti tabungan, giro dan deposito. Sedangkan untuk pihak yang kekurangan dana (defisit spending unit) dapat disalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki peran penting untuk memajukan perekonomian daerah. Masyarakat yang menyimpan dananya di BPR akan terjamin keamanannya karena BPR dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan diawasi oleh Otoritas jasa keuangan (OJK) (Juniarto, 2015).

Keberadaan BPR sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keuangan. Proses kredit yang relatif mudah dan cepat membuat BPR semakin diminati oleh masyarakat. Sebagian besar dana yang berhasil dihimpun oleh BPR, telah disalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk berbagai keperluan, seperti pengembangan usaha, modal kerja, kepemilikan dan renovasi rumah, pembelian kendaraan, dan lain-lain.

PT BPR BKK Jateng (Perseroda) adalah salah satu Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan seperti Bank Perkreditan Rakyat pada umumnya, yaitu menerima tabungan dan deposito dari masyarakat serta menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit. Kredit merupakan aktiva produktif yang memberikan pendapatan yang cukup besar bagi bank. Pendapatan ini berasal dari besarnya bunga kredit yang dibebankan kepada debitur. Semakin besar kredit yang diberikan, maka semakin besar juga laba yang akan didapat oleh bank. Namun dalam proses pemberian kredit, tidak semuanya bisa berjalan dengan lancar. Seringkali ditemukan debitur yang tidak membayar kewajibannya dengan tepat waktu, debitur menghilang, dan sebagainya. Oleh karena itu, sebelum memberikan kredit bank harus memperhatikan unsur 5C yaitu (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy) serta meneliti pengalaman calon debitur saat mengambil kredit di bank lain untuk menghindari permasalahan yang akan terjadi saat kredit sudah direalisasi (Umam, 2013).

PT BPR BKK Jateng (Perseroda) sebagai lembaga keuangan tidak terlepas dari permasalahan kredit, besar kecilnya jumlah kredit yang diberikan akan menentukan keuntungan bagi bank. Semakin banyak kredit yang diberikan maka semakin besar juga keuntungan yang didapat dari bunga kredit, akan tetapi resiko kredit bermasalahpun juga semakin besar. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.15/POJK.03/2017, Penggolongan kredit berdasarkan tingkat kolektibilitasnya dibagi menjadi 5 yaitu : Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Untuk kredit bermasalah, digolongkan kedalam kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.

Ketika memberikan fasilitas kredit, salah satu resiko yang dihadapi oleh bank adalah kredit bermasalah atau NonPerforming Loan (NPL). Kredit bermasalah timbul karena debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali pinjaman yang diterimanya dalam waktu yang telah disepakati antara kreditur dan debitur. Untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh debitur yang tidak mampu untuk melunasi kreditnya, maka bank perlu melakukan usaha penyelamatan yang dapat dilakukan dengan mengukur tingkat resiko kredit bermasalahnya dengan menggunakan rasio NonPerforming Loan (NPL). NonPerforming Loan (NPL) merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar resiko kredit bermasalah pada suatu bank yang diakibatkan karena ketidaklancaran debitur dalam melunasi kreditnya (Darmawi, 2011). Semakin rendah rasio NPL maka semakin baik tingkat kesehatan pada bank tersebut dan resiko kredit bermasalahpun akan semakin rendah. Namun, jika rasio NPL semakin tinggi maka semakin besar resiko kredit bermasalah yang ditanggung oleh pihak bank yang akan mengakibatkan berkurangnya laba pada bank tersebut. NPL yang tinggi merupakan salah satu kegagalan bank dalam menyalurkan kreditnya. Hal ini dapat kita ketahui bahwa NPL sangat berpengaruh terhadap profitabilitas suatu bank. Karena tingkat keuntungan bank tergantung dari kelancaran kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur. Sehingga apabila debitur tidak dapat melunasi kewajibannya, maka akan mempengaruhi kualitas kredit dari bank, dan hal ini berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan operasional di dalam bank.

Data Kolektibilitas Kredit PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Tahun 2019-2021

Kategori Kredit	Tahun		
	2019	2020	2021
Lancar (L)	13.822.847.743	8.512.134.322	9.998.476.187
Dalam Perhatian Khusus (DPK)	2.439.737.216	838.941.309	693.737.415
Kurang Lancar (KL)	841.123.114	508.660.132	410.148.130
Diragukan (D)	514.553.714	989.763.836	426.155.312
Macet (M)	42.269.650	1.673.612.545	1.718.160.390
Jumlah Kredit	17.660.531.437	12.163.112.144	13.246.677.434

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang diatas masalah tersebut pada salah satu produk kredit yaitu mikro bkk sebagaimana yang telah diuraikan, maka penulis mengacu masalah berikut ini: **“Faktor-faktor Apa yang Menyebabkan Terjadinya Kredit Macet pada PT BPR BKK JATENG (PERSERODA)CAB DEMAK”**

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui factor yang menyebabkn terjadinya kredit macet pada PT BPR BKK JATENG (PERSERODA)CAB DEMAK.
2. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan dalam mengatasi kredit macet.

1.3 Manfaat

1. Bagi Universitas Islam Sultan Agung Semarang Agar bisa meningkatkan kualitas literasi mahasiswa serta bisa digunakan sebagai acuan oleh mahasiswa lain dalam pembelajaran dan referensi mengenai SIA pengeluaran kas
2. Bagi PT BPR BKK JATENG (PERSERODA)CAB DEMAK Dari hasil analisis ini bisa digunakan sebagai salah satu dasar untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kredit macet.
3. Bagi Penulis Sebagai syarat memenuhi penulis untuk meraih gelar Amd. Ak di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) dan bentuk-bentuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut (IAI, 2002:31), Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

Menurut A, Abdurrachman (2014:6), Bank adalah suatu jenis Lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan.

Sedangkan Menurut, Kasmir (2008:7), menyatakan secara sederhana bahwa “Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Dari beberapa pengertian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa sebagaimana diatur dalam undang-undang yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat dan menyediakan fasilitas kredit yang diperuntukan untuk mensejahterakan ekonomi Masyarakat.

2.1.2 Jenis-jenis Bank

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 bank dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Bank Umum

Bank umum merupakan bank yang kegiatannya operasional dilakukan dengan prinsip konvensional atau syariah serta dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang melakukan kegiatan operasional secara konvensional atau syariah dan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ada beberapa jenis bank, yaitu:

a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya untuk memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menekankan aspek keadilan dalam bertransaksi mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan, serta menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.

c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.1.3 Fungsi Bank

Adapun fungsi bank dalam buku pemasaran bank Kasmir, SE.MM (tahun 2012 hal 9) sebagai berikut:

1. Menghimpun dana (funding) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dalam hal ini bank sebagai tempat penyimpanan uang untuk berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat. Kemudian untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Untuk memenuhi tujuan diatas, baik untuk mengamankan uang maupun untuk melakukan investasi, bank menyediakan sarana yang disebut dengan simpanan. Jenis simpanan yang ditawarkan sangat bervariasi tergantung dari bank yang bersangkutan. Secara umum, jenis simpanan yang ada di bank adalah terdiri dari simpanan giro (demand deposit), simpanan tabungan (saving deposit) dan simpanan deposito (time deposit).
2. Menyalurkan dana (lending) ke masyarakat, dalam hal ini bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam beberapa jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis kredit modal kerja atau kredit perdagangan.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (services) seperti pengiriman uang (transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (clearing), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (inkaso), letter of credit (L/C), safe deposit box, bank garansi, bank notes, traveler cheque dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.

2.2 Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

2.2.1 Pengertian Perkreditan Rakyat

Menurut Sakdiyah (2018 : 28) mengemukakan bahwa BPR (Bank Perkreditan Rakyat) merupakan lembaga bidang keuangan yang menerima tabungan dalam bentuk deposito berjangka kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman atau biasa disebut kredit. BPR ini memiliki azas demokrasi ekonomi dengan prinsip kerja prudential banking (kehati-hatian).

Terdapat pula pengertian lain menurut Fibriyanti, dkk (2018 791), BPR merupakan lembaga keuangan sejenis bank yang aktivitasnya memberikan jasa pinjaman kepada rakyat dan pemodal-pemodal kecil dengan sistem kerja konvensional serta memiliki prinsip syariah.

2.2.2 Fungsi dan Tujuan Bank Perkreditan Rakyat

Fungsi BPR menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Memberikan kredit. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank Perkreditan Rakyat memiliki tujuan yaitu adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

2.2.3 Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Berikut usaha yang dapat dilaksanakan oleh BPR:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

2.3 Kredit

2.3.1 Pengertian kredit

Istilah kredit berasal dari kata credere yang artinya adalah kepercayaan. Artinya, apabila seseorang menerima kredit berarti mereka memperoleh kepercayaan dari pihak pemberi kredit. Pemberi kredit percaya bahwa uang yang dipinjamkannya pasti akan kembali, penerima kredit (debitur) berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keperluannya dan berkewajiban untuk mengembalikan jumlah pinjamannya pada batas waktu yang telah ditentukan (Kasmir, 2012).

Menurut Andrianto (2020:1) menyatakan bahwa Kredit berasal dari kata “credere” yang berarti percaya atau to believe/ to trust. Artinya kredit mengandung unsur kepercayaan dari pihak bank kepada nasabah untuk dapat menggunakan kredit sebaik mungkin.

Menurut Undang Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 yang telah disempurnakan menjadi Undan Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 Pasal 1, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa kredit merupakan penyerahan barang, jasa, maupun uang dari pihak satu (Pihak pemberi pinjaman) dengan Pihak lainnya (Pihak Peminjam) dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dengan jumlah bagi hasil atau bunga dalam jangka waktu yang telah di sepakati.

2.3.2 Unsur Unsur Kredit

Unsur kredit merupakan bagian yang erat kaitannya dengan pemberian kredit. Menurut (Kasmir, 2019) unsur-unsur yang terdapat dalam kredit adalah:

1. Kepercayaan

Keyakinan bahwa kredit yang akan diberikan akan diterima dengan benar-benar dan dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Sebelum pihak bank memberikan kepercayaan kepada masyarakat atau calon nasabah, bank harus melakukan penelitian maupun penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan masa sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

2. Kesepakatan

Dituangkan dalam perjanjian yang dimana masing masing pihak baik dari Pemberi Kredit maupun pemohon kredit menandatangani hak dan kewajibannya.

3. Risiko

Dengan adanya jangka waktu pengembalian, akan menyebabkan adanya risiko tidak terbayarnya macet dalam pembayaran kredit. Semakin panjang jangka waktu kredit maka akan semakin besar juga risiko yang akan dihadapi. Yang dimana risiko ini akan menjadi tanggungan pihak bank.

4. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup pengembalian kredit atau pembayaran utang yang telah disepakati. Bisa dalam jangka waktu panjang, jangka waktu menengah dan jangka waktu pendek.

5. Balas Jasa

Merupakan suatu keuntungan atas pemberian kredit atau yang sering kita sebut dengan bunga. Bunga tersebut merupakan keuntungan pihak bank. sedangkan apabila bank tersebut berpegang pada prinsip syariah, maka balas jasa nya ditentukan dengan bagi hasil.

2.3.3 Tujuan dan Fungsi Kredit

Adapun tujuan pemberian suatu kredit menurut Kasmir (2018:88):

1. Mencari Keuntungan

Memperoleh keuntungan dari pemberian kredit terutama dalam bentuk bunga sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini bisa menjadi dana yang digunakan untuk kelangsungan operasional kegiatan suatu bank. jika bank mengalami kerugian, maka kegiatan bank akan ditutup atau di likuiditasi.

2. Membantu Para Nasabah

Untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana baik dalam investasi maupun dana modal kerja. Selain itu bank dapat mendorong usaha masyarakat dengan memberikan fasilitas kredit.

3. Membantu Pemerintah

- a. Penerimaan pajak yang diperoleh dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- b. Membuka kesempatan kerja, untuk kredit pembangunan usaha baru perluasan usaha.
- c. Menghemat devisa negara terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor.
- d. Meningkatkan jumlah barang dan jasa. sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.

Adapun fungsi kredit menurut Kasmir (2018:89) yaitu:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang (Utility) Dengan adanya kredit uang menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar keseluruh wilayah sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit uang tersebut akan menerima tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang Kredit yang diterima dapat digunakan untuk menciptakan barang yang tidak berguna menjadi berguna.
4. Meningkatkan Peredaran barang Kredit dapat memperlancar peredaran arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya.
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi Dengan adanya kredit akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat dan kredit dapat membantu dalam mengeksport barang Kredit dapat memperlancar peredaran arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya.
6. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut akan membutuhkan lowongan pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran.
7. Untuk meningkatkan hubungan internasional.
8. Meningkatkan kegairahan berusaha Masyarakat

2.3.4 Jenis-jenis Kredit

Menurut (Kasmir, 2014) jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain :

1. Dilihat dari segi kegunaan.
 - a. Kredit Investasi
Kredit investasi biasanya digunakan untuk investasi atau untuk perluasan usaha. Contoh : pembelian peralatan, pembangunan ruko, dan lain-lain. Kredit ini biasanya memiliki masa pemakaian yang relatif lebih lama, yaitu diatas 1 tahun.
 - b. Kredit Modal Kerja
Kredit modal kerja biasanya digunakan untuk modal usaha dan peningkatan produksi operasional, seperti pembelian bahan baku, membayar gaji karyawan, ataupun biaya lainnya yang berkaitan dengan produksi perusahaan.
2. Dilihat dari segi tujuan kredit
 - a. Kredit produktif
Yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha produksi atau investasi untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Sehingga pengembalian kredit diharapkan dari hasil usaha tersebut. Contoh : kredit untuk membangun pabrik, yang nantinya akan menghasilkan barang. Kredit pertanian yang nantinya akan menghasilkan produk pertanian, dan kredit industri lainnya.
 - b. Kredit konsumtif
Yaitu kredit yang digunakan untuk kebutuhan konsumtif guna memenuhi kebutuhan pribadinya seperti keperluan konsumsi baik sandang, pangan, maupun papan. Contoh : kredit perumahan, kredit mobil pribadi, dan kredit konsumtif lainnya.
 - c. Kredit perdagangan

Yaitu kredit yang digunakan untuk modal dalam membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Contoh : untuk membeli barang dagangan yang diberikan pada supplier atau agen.

3. Dilihat dari segi jangka waktu
 - a. Kredit jangka pendek

Yaitu kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun, atau paling lama satu tahun. Kredit ini biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contoh: untuk modal tani, ternak, dan lain-lain.
 - b. Kredit jangka menengah

Yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu sampai dengan tiga tahun. Kredit ini biasanya digunakan untuk keperluan investasi.
 - c. Kredit jangka Panjang

Yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya paling panjang, yaitu diatas tiga atau lima tahun. Kredit ini biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang.
4. Dilihat dari segi jaminan
 - a. Kredit dengan jaminan

Setiap pemberian kredit, minimal akan dilindungi oleh jaminan yang senilai. Dan jaminan yang diberikan nilainya harus melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan ini dapat berbentuk benda berwujud maupun tidak berwujud.
 - b. Kredit tanpa jaminan

Yaitu kredit yang diberikan dengan tidak menjaminkan suatu apapun, baik barang maupun orang. Kredit ini biasanya diberikan kepada perusahaan yang bonafide serta memiliki prospek usaha yang cukup bagus.
5. Dilihat dari segi sektor usaha
 - a. Kredit pertanian

Yaitu kredit yang diberikan untuk sektor perkebunan atau pertanian.
 - b. Kredit peternakan

Yaitu kredit yang digunakan untuk sektor peternakan. Baik jangka pendek maupun jangka panjang.
 - c. Kredit industry

Yaitu kredit yang digunakan untuk sektor industri, baik industri kecil, menengah ataupun industri skala besar.
 - d. Kredit pertambangan

Yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha tambang. Kredit ini biasanya digunakan dalam jangka panjang.
 - e. Kredit Pendidikan

Yaitu kredit yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
 - f. Kredit perumahan

Yaitu kredit yang digunakan untuk biaya pembangunan atau pembelian rumah. Kredit ini biasanya digunakan dalam jangka panjang.

g. Kredit Profesi

Yaitu kredit yang dialokasikan kepada kelompok profesional seperti : dokter, pengacara, guru yang cara pembayaran angsurannya dapat dilakukan setiap akhir bulan sesuai dengan batas waktu yang disepakati.

2.3.5 Analisis Kredit

Analisis kredit merupakan proses penilaian resiko pemberian kredit kepada debitur. Seseorang layak untuk mendapatkan kredit apabila telah melewati tahap analisis. Tujuan utama analisis kredit adalah untuk mengetahui kesanggupan dan kesungguhan debitur untuk membayar kembali pinjamannya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada dalam perjanjian kredit (Darmawi, 2012).

Pemberian kredit yang sehat harus melalui analisa yang cermat. Hal ini merupakan salah satu penilaian umum yang dilakukan oleh bank agar mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk mendapatkan kredit. Menurut (Khaerul, 2013) penilaian tersebut dilakukan dengan 5C, yaitu:

1. Character

Merupakan keadaan watak/sifat nasabah dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Hal ini dapat dilihat dari riwayat nasabah, reputasi nasabah, dan informasi dari bank lain. Karena ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk membayar kewajibannya.

2. Capacity

Yaitu kemampuan yang dimiliki oleh nasabah dalam menjalankan usahanya untuk bisa memperoleh laba yang optimal, hal ini digunakan untuk melihat apakah ia bisa melunasi kewajibannya sesuai dengan batas waktu

3. Capital

Yaitu jumlah modal yang dimiliki oleh nasabah. Semakin tinggi modal yang dimiliki nasabah maka semakin tinggi kesungguhan nasabah dalam menjalankan usahanya, sehingga bank semakin yakin untuk memberikan kreditnya.

4. Collateral

Merupakan suatu barang yang diserahkan kepada pihak bank sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Apabila debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman dari bank, maka pihak bank bisa saja menjual jaminan yang telah dijaminkan oleh debitur untuk menutup hutangnya.

5. Condition

Yaitu keadaan ekonomi, sosial, budaya yang mempengaruhi kelancaran nasabah untuk melunasi kewajibannya. Kondisi ekonomi sangat berpengaruh terhadap kelancaran usaha debitur.

2.3.6 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit merupakan suatu tahapan yang harus dilalui oleh calon debitur untuk bisa mendapatkan fasilitas kredit. Prosedur pemberian kredit oleh bank secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Perbedaannya hanya terletak pada persyaratan dan pertimbangan masing-masing bank. Tujuan dari prosedur pemberian kredit adalah agar kredit yang disalurkan dapat berjalan lancar dan dapat kembali dengan tepat waktu.

Menurut (Kasmir, 2014), prosedur pemberian kredit oleh badan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas-berkas

Tahap pertama yaitu pengajuan berkas, dimana pemohon akan mengajukan suatu permohonan yang dilampiri dengan berkas pendukung lainnya yang dibutuhkan.

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tahap kedua merupakan penyelidikan berkas pinjaman, tujuannya untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan.

3. Wawancara I

Merupakan tahap penyelidikan kepada calon debitur, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sudah lengkap dan sesuai dengan yang diinginkan bank.

4. On the Spot

Merupakan kegiatan investigasi ke lapangan untuk meninjau beberapa objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil on the spot akan dicocokkan dengan hasil wawancara I.

5. Wawancara II

Merupakan tahap perbaikan berkas apabila terdapat kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan.

2.4 Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)

2.4.1 Pengertian Kredit Bermasalah

Menurut (Kasmir, 2013) Kredit bermasalah adalah kredit yang didalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu dari pihak bank dalam menganalisis permohonan kredit maupun dari pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran. Sementaramenurut (Darmawi, 2011), Kredit bermasalah adalah salah satu pengukuran rasio risiko usaha bank yang menunjukkan besarnya risiko kredit bermasalah yang ada pada suatu bank. Kredit bermasalah diakibatkan oleh ketidaklancaran pembayaran pokok pinjaman dan bunga yang secara langsung dapat menurunkan kinerja bank dan menyebabkan kurang lancarnya kegiatan operasional di dalam bank.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kredit bermasalah merupakan kredit yang mengalami kesulitan dalam pembayaran sampai pada saat jatuh

tempo akibat adanya unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan dari debitur yang berasal dari faktor internal maupun eksternal yang dapat mengakibatkan kerugian bagi bank.

2.4.2 Rasio Non Performing Loan (NPL)

Rasio Non Performing Loan (NPL) adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat persentase antara jumlah kredit bermasalah (kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet) dibandingkan dengan jumlah kredit yang diberikan (Sujai, 2019).

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 rasio presentase Non Performing Loan (NPL) maksimum adalah sebesar 5%, apabila rasio NPL melebihi 5%, maka kualitas rasio NPL tersebut dikatakan tidak sehat. Kriteria penilaian kualitas rasio Non Performing Loan (NPL) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 1 Kriteria Penilaian Kualitas Rasio Non Performing Loan (NPL)

Rasio	Predikat
$NPL \leq 5\%$	Sehat
$NPL \geq 5\%$	Tidak sehat

(Sumber : PBI No.15/2/PBI/2013)

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 6/23/DPNP tentang Kriteria Penetapan Peringkat Profil Risiko dengan Rasio Non Performing Loan(NPL), besarnya persentase Non Performing Loan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Jumlah kredit}} \times 100\%$$

Kredit Bermasalah :

Kredit Kurang Lancar = Penundaan pembayaran angsuran yang melebihi 90 hari.

Kredit Diragukan = Penundaan pembayaran angsuran yang melebihi 120 hari.

Kredit Macet = Penundaan pembayaran angsuran yang melebihi 180 hari.

2.4.3 Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah

Dalam pemberian kredit, tidak semuanya akan berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh bank. Ada dua faktor yang menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah. Faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah menurut (Ismail, 2016) adalah :

1. Faktor internal bank
 - a. Adanya analisis yang kurang tepat, sehingga pihak bank sulit untuk memprediksi hal yang akan terjadi selama jangka waktu kredit. Contoh : kredit yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan debitur, sehingga debitur tidak mampu untuk membayar angsuran karena melebihi kemampuan yang dimilikinya.
 - b. Adanya kolusi yang dilakukan oleh pejabat yang menangani kredit, sehingga kredit yang diberikan tidak tepat sasaran.

- c. Adanya keterbatasan pengetahuan dari pejabat bank terhadap usaha yang dijalankan oleh debitur, sehingga tidak dapat menganalisis dengan akurat.
- d. Adanya kelemahan dalam proses pembinaan dan monitoring kredit kepadadebitur.

2. Faktor eksternal bank

- a. Adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh debitur seperti : Debitur sengaja untuk tidak membayar angsurannya kepada bank, Debitur melakukan pengembangan usaha yang terlalu besar sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar, Debitur menggunakan dana kredit tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- b. Adanya unsur ketidaksengajaan yang dilakukan oleh debitur seperti : Kondisi ekonomi yang mengakibatkan lemahnya kemampuan yang dimiliki oleh debitur dalam membayar angsuran, Usaha yang dimiliki oleh debitur bangkrut sehingga menyebabkan kerugian, Adanya perubahan kebijakan dan aturan pemerintah.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2018) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan yang nyata sekarang dan lebih banyak bersifat uraian baik dari hasil wawancara atau studi dokumentasi. Data yang diperoleh akan dianalisis serta diuraikan dalam bentuk deskriptif untuk mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasikan dan menafsirkan data sehingga dapat menggambarkan terkait keadaan yang ada.

3.2 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT BPR BKK JATENG (PERSERODA)DEMAK. Objek dari penelitian ini adalah kredit bermasalah. Penelitian ini dilakukan di bagian customer service PT BPR BKK JATENG (PERSERODA)DEMAK. Penulis memilih PT BPR BKK JATENG (PERSERODA)DEMAK sebagai objek penelitian karena tempat tersebut terdapat kredit yg bermasalah.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dokumentasi

3.4 Waktu dan Tempat Penelitian

Pelaksanaan penelitian bertempat di Jl. Sultan Hadijaya No.8, Nogorame, Mangunjiwan, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59515 dari tanggal 27 Juli sampai dengan 8 September 2023.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan penelitian deskriptif melalui metode kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan pengungkapan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kondisi di lapangan dan kepustakaan berupa literatur, peraturan, dan kebijakan yang berhubungan dengan analisis kredit.

BAB IV

HASIL PENGMATAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Profil PT BPR BKK JATENG (PERSERODA)DEMAK



Nama : PT BPR BKK JATENG (PERSERODA)DEMAK
Alamat : Jl. Sultan Hadiwijaya No.8, Ngorame, Mangunjiwan, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59515
Fax :
E-Mail :

Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Demak disingkat PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) CABANG DEMAK merupakan badan usaha milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Demak dalam bidang Perbankan yang, Beralamat di Jl Sultan Hadiwijaya No. 9 Demak. Berdiri sebagai badan hukum dengan ijin Operasionalnya didasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor Dsa.G226/1969-8/2/4 tanggal 4 September 1969 Jo. Nomor Dsa. G.323/1970-12/19/24 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.11 tahun 1981. Kemudian mengalami perubahan dengan Peraturan Daerah No.2 tahun 1988 tentang Badan Kredit Kecamatan untuk melanjutkan usaha dengan menyamakan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pendirian PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan surat keputusan

No.1064/KM.00/1988 tanggal 27 Oktober 1988 Jo. Keputusan Menteri Keuangan Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.Kep./318/KM.13/1991 tanggal 8 Oktober 1991.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian Jawa Tengah, ternyata perkembangan operasional PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK makin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Kabupaten Demak melakukan merger pada tanggal 24 November 2005, sesuai dengan keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor : 7/16/KEP.Dpg/2005 dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 503/74/2005 tentang Pemberian Ijin Penggabungan Usaha (Merger) sehingga mempunyai 5 Kantor Kas Cabang dan 1 Kantor Pusat yaitu : PT BPR BKK Demak Kantor Pusat Operasional, Kantor Kas Cabang Dempet, Kantor Kas Cabang Bonang, Kantor Kas Cabang Kebonagung, Kantor Kas Cabang Karanganyar, Kantor Kas Cabang Guntur.

Visi

Menjadi bank terkemuka dengan mengutamakan kepuasan nasabah.

Misi

1. Fokus pada pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Jawa Tengah.
2. Memberikan kualitas layanan prima dengan sdm yang profesional dengan tata kelola atas azas gcg.
3. Berkontribusi laba yang optimal kepada pemerintah.

Produk Pelayanan PT BPR BKK JATENG (Perseroda)

1. Produk Simpanan PT BPR BKK JATENG (Perseroda)

Bahwa dalam rangka Meningkatkan fungsi intermediasi dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, maka PT BPR BKK Jateng (Perseroda) menjalankan kegiatan penghimpunan simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito yaitu:

a. TABUNGAN

- Tabungan TAWA adalah Tabungan yang diperuntukkan bagi siswa/pelajar PAUD, TK, SD, SMP, SMA atau yang sederajat
- Tabungan TAMADES adalah Tabungan bagi penabung Perorangan, Kelompok, Perusahaan, Lembaga, Yayasan dan Koperasi maupun Badan Usaha
- Tabungan BKK PRIORITAS adalah Tabungan bagi Nasabah prioritas perorangan
- Tabungan KREDIT BKK adalah tabungan bagi penabung debitur PT BPR BKK Jateng (Perseroda) baik perorangan maupun korporasi

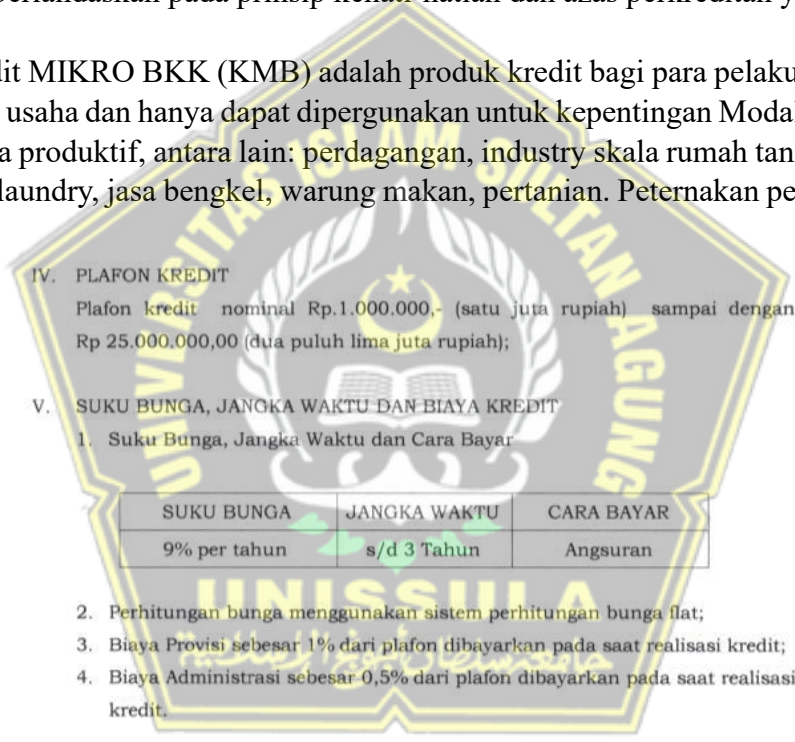
b. DEPOSITO

Deposito BKK Deposito adalah simpanan dari pihak ketiga kepada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan Bank.

2. Poduk Kredit PT BPR BKK JATENG (Perseroda) Kas Cabang Dempet

Bahwa untuk meningkatkan fungsi intermediasi dalam penyaluran kredit agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan serta keinginan masyarakat perlu didukung produk kredit dengan fitur jenis penggunaan modal kinerja, investasi dan konsumsi, sehingga portofolio kredit mampu meningkatkan produktifitas dan pendapatan perkapita masyarakat di Propinsi Jawa Tengah, khususnya kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan berlandaskan pada prinsip kehati-hatian dan azas perkreditan yang sehat.

- a. Kredit MIKRO BKK (KMB) adalah produk kredit bagi para pelaku usaha Mikro semua jenis usaha dan hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan Modal Kinerja pada sektor usaha produktif, antara lain: perdagangan, industry skala rumah tangga, toko kelontong, jasa laundry, jasa bengkel, warung makan, pertanian. Peternakan perikanan, dan lainnya.



IV. PLAFON KREDIT
Plafon kredit nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

V. SUKU BUNGA, JANGKA WAKTU DAN BIAYA KREDIT

1. Suku Bunga, Jangka Waktu dan Cara Bayar

SUKU BUNGA	JANGKA WAKTU	CARA BAYAR
9% per tahun	s/d 3 Tahun	Angsuran

2. Perhitungan bunga menggunakan sistem perhitungan bunga flat;
3. Biaya Provisi sebesar 1% dari plafon dibayarkan pada saat realisasi kredit;
4. Biaya Administrasi sebesar 0,5% dari plafon dibayarkan pada saat realisasi kredit.

Gambar 4. 1 Produk Kredit

- b. Kredit BKK JOGLO adalah produk kredit untuk kepemilikan rumah dan/atau tanah bagi masyarakat umum baik perorangan maupun badan usaha. Kredit BKK JOGLO dapat digunakan untuk pembelian rumah, apartemen, ruko/rukan, villa, tanah kosong/lahan, pekarangan, kapling baik melalui pengembangan maupun perorangan, juga untuk biaya pembangunan/rehab.

c. Renovasi / Pengembangan Rumah

Plafon	Jangka Waktu	Suku Bunga
≤ Rp.250 juta	s/d 60 bulan	12,00 % - 18 % pa
>Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	s/d 84 bulan	11,00 % - 18 % pa
>Rp.500 juta s/d Rp.1 milyar	s/d 96 bulan	10,50 % - 18 % pa

d. Take Over KPR

Plafon	Jangka Waktu	Suku Bunga
s/d Rp.250 juta	s/d 120 bulan	12,00 % - 18 % pa
>Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	s/d 180 bulan	11,00 % - 18 % pa
>Rp.500 juta s/d Rp.1 milyar	s/d 204 bulan	10,50 % - 18 % pa

2. Bagi Debitur Pengembang

e. Pembelian Lahan

Plafon	Jangka Waktu	Suku Bunga
≤ Rp.1 milyar	s/d 36 bulan	12,00 % - 18 % pa
>Rp.1 milyar s/d Rp.2,5 milyar	s/d 48 bulan	11,00 % - 18 % pa
>Rp.2,5 milyar s/d Rp.5 milyar	s/d 60 bulan	10,50 % - 18 % pa

f. Konstruksi

Plafon	Jangka Waktu	Suku Bunga
≤ Rp.1 milyar	s/d 12 bulan	11,00 % - 18 % pa
>Rp.1 milyar s/d Rp.2,5 milyar	s/d 24 bulan	10,50 % - 18 % pa
>Rp.2,5 milyar s/d Rp.5 milyar	s/d 36 bulan	10,00 % - 18 % pa

g. Pembangunan Perumahan

Plafon	Jangka Waktu	Suku Bunga
≤ Rp.1 milyar	s/d 24 bulan	12,00 % - 18 % pa
>Rp.1 milyar s/d Rp.2,5 milyar	s/d 36 bulan	11,50 % - 18 % pa
>Rp.2,5 milyar s/d Rp.5 milyar	s/d 60 bulan	11,00 % - 18 % pa

Gambar 4. 2 Produk kredit BBK joglo

- c. Kredit BKK SINDEN adalah produk kredit bagi para pelaku usaha dibidang seni dan industri kreatif, baik berbasis budaya maupun pengembangan teknologi, di sektor industri, perdagangan maupun jasa dan dapat dipergunakan untuk kepentingan Modal Kerja dan Investasi.

IV. PLAFOND, JANGKA WAKTU DAN SUKU BUNGA KREDIT

PLAFOND	JANGKA WAKTU	SUKU BUNGA
s/d Rp.250 juta	s/d 60 bulan	12,00% s/d 18,00% pa
>Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	s/d 72 bulan	11,50% s/d 18,00% pa
>Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar	s/d 96 bulan	11,00 % s/d 18,00% pa
>Rp.1 miliar s/d Rp.2 miliar	s/d 120 bulan	11,00 % s/d 18,00% pa

Gambar 4. 3 Produk kredit BKK sinden

- d. Kredit BKK KORPORASI adalah kredit kepada perusahaan atau lembaga yang telah berbadan hukum, yang bergerak di sektor industri, konstruksi, pengadaan barang dan jasa serta sektor usaha lainnya untuk kegunaan dana sebagai modal kerja.

IV. PLAFOND, JANGKA WAKTU DAN SUKU BUNGA KREDIT

PLAFOND	JANGKA WAKTU	SUKU BUNGA
≤ 2,5 Milyar	12 bulan	12,00% s/d 18,00% pa
> 2,5 milyar s/d 5 milyar	12 bulan	11,00% s/d 18,00% pa

V. BIAYA KREDIT

1. Biaya Provisi dan biaya administrasi berdasarkan plafond kredit dan dibayarkan pada saat realisasi kredit dengan ketentuan sebagai berikut;

JANGKA WAKTU	PROVISI	ADMINISTRASI
s/d 3 bulan	1%	-
s/d 6 bulan	1%	0,25 %
s/d 12 bulan	1%	0,50 %

Gambar 4.4 produk kredit BKK korporasi

- e. Kredit BKK BUMDES adalah produk kredit bagi Badan Usaha Milik Desa, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi bagi pengembangan dan pemberdayaan usaha yang dimiliki, guna meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

IV. PLAFOND, JANGKA WAKTU, SUKU BUNGA DAN POLA BAYAR

- a. Dengan pola bayar angsuran

PLAFOND	JANGKA WAKTU	SUKU BUNGA
Rp.50 juta s/d Rp.250 juta	36 bulan	12,00% s/d 18,00% pa
>Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	48 bulan	11,00% s/d 18,00% pa
>Rp.500 juta s/d Rp.1 milyar	60 bulan	10,00% s/d 18,00% pa

Gambar 4.5 Produk kredit BKK Bumdes

- f. Kredit Kolektif Karyawan (K3) adalah produk kredit untuk para pegawai atau karyawan baik Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD mau pun Perusahaan Swasta untuk kepentingan konsumtif dan angsuran dilakukan dengan pemotongan gaji oleh Bendahara gaji Instansi/Dinas/Perusahaanterkait.

V. JANGKA WAKTU DAN SUKU BUNGA KREDIT

1. Jangka waktu kredit maksimal 120 (seratus dua puluh) bulan;
2. Jangka waktu kredit berdasarkan plafon:

PLAFOND	JANGKA WAKTU	SUKU BUNGA
s/d Rp.25 juta	s/d 60 bulan	10,50 % s/d 18,00 % pa
>Rp.25 juta s/d Rp.50 juta	s/d 72 bulan	10,50 % s/d 18,00 % pa
>Rp.50 juta s/d Rp.100 juta	s/d 84 bulan	11,00 % s/d 18,00 % pa
>Rp.100 juta s/d Rp.150 juta	s/d 96 bulan	11,50 % s/d 18,00 % pa
>Rp.150 juta s/d Rp. 200 juta	s/d 120 bulan	11,50 % s/d 18,00 % pa

Gambar 4.6 Produk Kredit K3

- g. Kredit Kesejahteraan Pengurus dan Pegawai (KKPP) adalah penyediaan dana bagi Pengurus dan Pegawai PT BPR BKK Jateng (Perseroda) yang ditujukan untuk kesejahteraan yang diangsur dari gaji setiap bulan.

Jabatan	Plafon Maksimal (Rp)	Jangka Waktu Maksimal
- Komisaris	750 Juta	4 Tahun/Sisa Masa Jabatan
- Direksi	1 Milyar	5 Tahun/Sisa Masa Jabatan
- Pegawai Tetap :		
Kepala Divisi/Satuan Kerja	500 Juta	15 Tahun / Sisa Masa Kerja
Kepala Cab. Koordinator (KCK)	500 Juta	15 Tahun / Sisa Masa Kerja
Kepala Cabang /Wakil KCK	400 Juta	15 Tahun / Sisa Masa Kerja
Kepala Bidang	250 Juta	15 Tahun / Sisa Masa Kerja
Kepala Sub Bidang	200 Juta	15 Tahun / Sisa Masa Kerja
Kepala Kantor Kas	200 Juta	15 Tahun / Sisa Masa Kerja
Staff	150 Juta	15 Tahun/ Sisa Masa Kerja
- Pegawai Kontrak :		
Anggota Komite	200 Juta	3 Tahun
Staff	50 Juta	3 Tahun

Gambar 4.7 Produk kredit KKPP

- h. Kredit BKK BAHARI adalah produk kredit untuk modal kerja dan investasi bagi pelaku usaha dibidang kelautan dan perikanan baik perorangan, kelompok maupun badan usaha.

VI. PLAFOND, JANGKA WAKTU DAN SUKU BUNGA KREDIT

1. Bagi Debitur Perorangan

PLAFON	JANGKA WAKTU	SUKU BUNGA
≤ Rp.250 juta	s/d 36 bulan	12,00 % - 18 % pa
>Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	s/d 48 bulan	11,00 % - 18 % pa
>Rp.500 juta s/d Rp.1 milyar	s/d 60 bulan	10,50 % - 18 % pa

2. Debitur Kelompok Nelayan

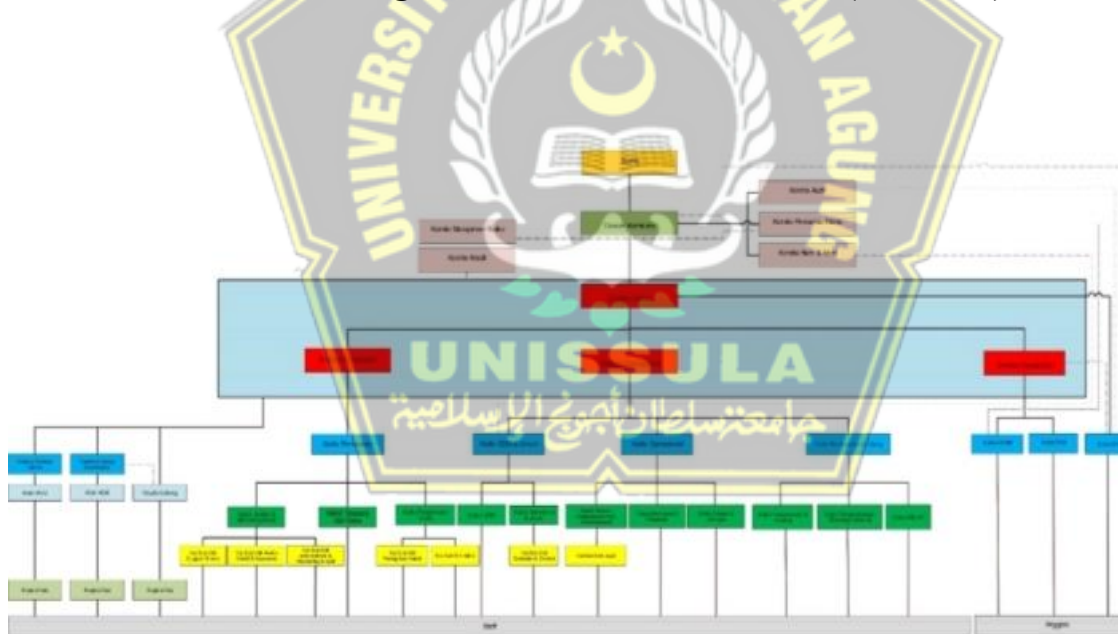
PLAFON	JANGKA WAKTU	SUKU BUNGA
≤ Rp. 1 milyar	s/d 24 bulan	12,00 % - 18 % pa
>Rp.1 milyar s/d Rp.3 milyar	s/d 36 bulan	11,00 % - 18 % pa
>Rp.3 milyar s/d Rp.5 milyar	s/d 60 bulan	10,50 % - 18 % pa

3. Debitur Badan Usaha

PLAFON	JANGKA WAKTU	SUKU BUNGA
≤ Rp. 5 milyar	s/d 48 bulan	11,00 % - 18 % pa
>Rp.5 milyar s/d Rp.10 milyar	s/d 60 bulan	10,00 % - 18 % pa

Gambar 4.8 Produk Kredit BKK bahari

4.2 Struktur organisasi PT BPR BKK JATENG (Perseroda)



Gambar 4.9 Struktur Organisasi

1. Kepala Kantor Kas.

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan di kantor kas.
- b. Pengkoordinasian target penghimpunan dan penyaluran dana.

- c. Pengkoordinasian penerapan program APU PPT.
- d. Pengkoordinasian kegiatan pengkinian data.
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan rekening di wilayah operasional kantor kas.
- f. Pengkoordinasian pemeliharaan performa kredit di wilayah operasional kantor kas.
- g. Pengevaluasian pencapaian kinerja kantor kas.
- h. Memasarkan produk Perusahaan.
- i. Melaksanakan perintah kedinasan dari atasan.
Membangun dan menjaga citra yang baik untuk mendukung dan menjaga nilai Perusahaan

2. Staff SDM

- a. Penyelenggaraan administrasi dan data base kepegawaian.
- b. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai.
- c. Penyelenggaraan usulan kenaikan kepangkatan, gaji berkala dan purna tugas pegawai.
- d. Penyusunan usulan cuti pegawai
- e. Membantu memasarkan produk Perusahaan
- f. Melaksanakan perintah kedinasan dari atasan;g. Membangun dan menjaga citra yang baik untuk mendukung dan menjaga nilai perusahaan.

3. Staff kesekretariat dan umum

- a. Membantu penyelenggaraan dan pengelolaan aktivitas internal dan eksternal Perusahaan.
- b. Membantu penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan.
- c. Membantu pengelolaan urusan kedinasan, kerumahtanggaan dan kemasyarakatan.
- d. Membantu penyelenggaraan dan pengelolaan asset Perusahaan.
- e. Membantu penyelenggaraan dan pengelolaan dokumen, arsip dan surat menyurat dan lainnya.
- f. Membantu penyelenggaraan layanan administrasi untuk untuk mendukung operasional Perusahaan.

- g. Membantu memasarkan produk perusahaan;
- h. Melaksanakan perintah kedinasan dari atasan;
- i. Membangun dan menjaga citra yang baik untuk mendukung dan menjaga nilai Perusahaan.

4. Staff administrasi dan monitoring kredit

- a. Membantu penyusunan rencana kerja bidang administrasi dan monitoring kredit.
- b. Penyelenggaraan administrasi dan verifikasi dokumen kredit
- c. Pengaturan dan penyelenggaraan Rapat Komite Kredit (RKK)
- d. Penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan data dan dokumen perkreditan
- e. Penyelenggaraan monitoring kredit
- f. Penyelenggaraan data tagihan kredit
- g. Penyelenggaraan dokumentasi bidang perkreditan
- h. Penyelenggaraan tindak lanjut Rapat Komite Kredit (RKK)
- i. Membantu menyusun rencana kerja dan anggaran bidangnya
- j. Membantu memasarkan produk Perusahaan
- k. Melaksanakan perintah kedinasan dari atasan
- l. Membangun dan menjaga citra yang baik untuk mendukung dan menjaga nilai perusahaan.

5. Customer Service

- a. nasabah terkait pelayanan produk dan jasa
- b. Penyelenggaraan pengendalian risiko operasional dengan menjalankan fungsi dan tugas APU PPT
- c. Penyelenggaraan penyelesaian terhadap ketidakpuasan nasabah atas pelayanan yang telah diberikan oleh Perusahaan dengan penanganan pengaduan nasabah
- d. Penyelenggaraan pelayanan pembukaan rekening yang dilakukan oleh nasabah atau calon nasabah
- e. Penyelenggaraan verifikasi dan konfirmasi data nasabah dalam rangka penerapan PAU PPT
- f. Penyelenggaraan pelayanan penutupan rekening tabungan dan deposito yang dilakukan oleh nasabah
- g. Penyelenggaraan pelayanan aduan nasabah dengan pemberian solusi penyelesaian

- h. Penyelenggaraan pelayanan kepada nasabah terhadap jasa dan produk bank terkait transfer, pemindahbukuan dan lain – lain
- i. Penyelenggaraan tata kelola administrasi data nasabah secara tertib dan rapi
- j. Penyelenggaraan tata kelola dokumen, warkat dan surat berharga Perusahaan yang berkaitan dengan tugas tanggungjawabnya
- k. Membantu memasarkan produk perusahaan;l. Membantu melaksanakan perintah kedinasan dari atasan;m. Membantu membangun dan menjaga citra yang baik untuk mendukung dan menjaga nilai perusahaan.

6. Staff Teller

- a. Penyelenggaraan pelayanan jasa keuangan dengan nasabah
- b. Penyelenggaraan pelayanan transaksi keuangan yang bersifat tunai maupun non tunai atas pemanfaatan fasilitas produk dan jasa oleh nasabah atau calon nasabah sesuai dengan standar pelayanan nasabah
- c. Pengelolaan uang tunai yang ada di kasanah maupun yang ada dalam kelolaan Teller sesuai dengan prosedur
- d. Pemberian kenyamanan dalam pelayanan transaksi keuangan sesuai dengan kewenangannya
- e. Penerimaan, penghitungan dan pencocokan kas awal dan kas yang diterima dari transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasabah
- f. Pemeriksaan keaslian uang setoran yang dilakukan oleh nasabah maupun oleh Walk In Customer (WIC)
- g. Pengkoordinasian transaksi diatas kewenangannya yang membutuhkan approval atau otorisasi dari pejabat di atasnya
- h. Penyelenggaraan pelayanan setoran Penerimaan Negara, Pengiriman Uang atau pelayanan jasa bank lainnya
- i. Pelaksanaan entry data transaksi keuangan kedalam system dan penyelesaian semua laporan harian Teller
- j. Pelaksanaan penghitungan dan pencocokan total transaksi kas, antara uang phisik dan jumlah uang yang tercatat dalam system.

7. Staff Account Officer Dana

- a. Penyusunan kegiatan penghimpunan dana dengan penerapan prinsip kehati – hatian
- b. Penyusunan rencana penghimpunan dana per jenis simpanan dan per jenis produk secara periodic
- c. Penyelenggaraan maintenance atau pemeliharaan nasabah simpanan dalam rangka meningkatkan outstanding dana pihak ketiga terutama nasabah deposan dan penabung untuk meningkatkan nilai retensi
- d. Penyelenggaraan administrasi dan verifikasi dokumen aplikasi nasabah dalam rangka penerapan APU PPT
- e. Penyelenggaraan layanan penghimpunan dana dengan penerapan prinsip Mengenal Nasabah (KYC)
- f. Penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan data dan dokumen simpanan dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada LPS dan pihak lainnya Penyelenggaraan kegiatan pengkinian data

4.3 Hasil Pengamatan

Non Performing Loan (NPL) merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar dan seberapa banyak jumlah kredit yang bermasalah. Kredit bermasalah pada suatu bank diakibatkan oleh ketidaklancaran debitur dalam melunasi kreditnya. Adapun yang termasuk kredit bermasalah menurut Peraturan Otoritas jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.03/2017 yaitu kredit yang digolongkan ke dalam Kolektibilitas : Kurang Lancar (KL), Diragukan (D) dan Macet (M). Semakin tinggi rasio NPL, maka semakin tinggi pula tingkat kredit bermasalah yang terjadi pada bank tersebut. Dan hal ini juga akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank dan kemampuannya dalam menyalurkan kredit.

Data Kolektibilitas Kredit PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Tahun 2019-2021

Kategori Kredit	Tahun		
	2019	2020	2021
Lancar (L)	13.822.847.743	8.512.134.322	9.998.476.187
Dalam Perhatian Khusus (DPK)	2.439.737.216	838.941.309	693.737.415
Kurang Lancar (KL)	841.123.114	508.660.132	410.148.130
Diragukan (D)	514.553.714	989.763.836	426.155.312
Macet (M)	42.269.650	1.673.612.545	1.718.160.390
Jumlah Kredit	17.660.531.437	12.163.112.144	13.246.677.434

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah kredit yang disalurkan oleh PT BPR BKK Jateng (Perseroda) selama 3 tahun terakhir mengalami fluktuasi dan juga mengalami kenaikan kredit macet yang cukup signifikan. Dimana pada tahun 2019 jumlah kredit yang disalurkan sebesar Rp.17.660.531.437, lalu menurun pada tahun 2020 menjadi Rp.12.163.112.144 dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar Rp.13.246.677.434. Sedangkan untuk kredit macet pada tahun 2019 sebesar Rp. 42.269.650 lalu pada tahun 2020 meningkat cukup signifikan menjadi Rp. 1.673.612.545 dan pada tahun 2021 meningkat lagi menjadi Rp. 1.718.160.390.

Berdasarkan tabel 3.1 diatas, dapat dilihat bahwa kategori Kredit Lancar

mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 5.310.713.418 dari tahun sebelumnya, dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.486.341.865.

Untuk kredit dalam kategori Dalam Perhatian Khusus mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Dimana pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.439.737.216 lalu menurun pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.600.795.907 dan pada tahun 2021 menurun sebesar Rp. 145.203.894.

Untuk kredit dalam kategori Kurang Lancar mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Dimana pada tahun 2019 sebesar Rp. 841.123.114 menurun pada tahun 2020 sebesar Rp. 332.462.982 dan pada tahun 2021 menurun sebesar Rp. 98.512.002.

Untuk kredit dalam kategori Diragukan mengalami peningkatan dan penurunan. Dimana pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 475.210.122 dari tahun sebelumnya, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 563.608.524 dari tahun sebelumnya.

Untuk kredit dalam kategori Macet mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Dimana pada tahun 2019 sebesar Rp. 42.269.650 lalu mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.631.342.895 dan pada tahun 2021 meningkat sebesar Rp. 44.547.845.

a. Perhitungan Rasio *Non Performing Loan*.

Tabel 4 1 Data Kolektibilitas Kredit Tahun 2019

Kategori Kredit	Jml Rek	Baki Debet	%
Lancar	719	13.822.847.743	78,27%
Dalam Perhatian Khusus	102	2.439.737.216	13,81%
Kurang Lancar	78	841.123.114	4,76%
Diragukan	44	514.553.714	2,91%
Macet	7	42.269.650	0,24%
Jumlah	950	17.660.531.437	100%

(Sumber : Laporan Rekap Nominatif Kredit Tahun 2019, Data diolah)

Berdasarkan tabel 4.2 dan perhitungan diatas, dapat dilihat bahwa rasio NPL pada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) 2019 yaitu sebesar 7,91%, hal ini terjadi karena kredit yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian, seperti kredit modal kerja tetapi digunakan untuk keperluan konsumtif, Adanya masalah dalam keluarga debitur seperti perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, serta kurangnya kesadaran dari debitur untuk membayar kewajibannya. Berdasarkan standar maksimum rasio yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka rasio NPL pada tahun 2019 dapat dikategorikan tidak sehat, karena nilainya melebihi 5%.

Tabel 4 2 Data Kolektibilitas Kredit Tahun 2020

Kategori Kredit	Jml Rek	Baki Debet	%
Lancar	482	8.512.134.322	69,98%
Dalam Perhatian Khusus	64	838.941.309	6,89%
Kurang Lancar	56	508.660.132	4,18%
Diragukan	97	989.763.836	8,13%
Macet	150	1.673.612.545	13,75%
Jumlah	849	12.163.112.144	100%

Berdasarkan tabel 4.3 dan perhitungan diatas, dapat dilihat bahwa rasio NPL pada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) 2020 yaitu sebesar 26,08%, hal ini

mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan matinya roda perekonomian rakyat, usaha yang dimiliki oleh debitur bangkrut, sehingga debitur tidak mampu untuk membayar angsurannya kepada pihak bank.

Berdasarkan standar maksimum rasio yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka rasio NPL pada tahun 2020 dapat dikategorikan tidak sehat, karena nilainya melebihi 5%

Kategori Kredit	Jml Rek	Baki Debet	%
Lancar	494	9.998.476.187	75,48%
Dalam Perhatian Khusus	54	693.737.415	5,23%
Kurang Lancar	24	410.148.130	3,09%
Diragukan	41	426.155.312	3,21%
Macet	207	1.718.160.390	12,98%
Jumlah	820	13.246.677.434	100%

Tabel 4.3 Data Kolektibilitas Kredit Tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.4 dan perhitungan diatas, dapat dilihat bahwa rasio NPL pada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) 2021 yaitu sebesar 19,28%, hal ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena pada tahun 2021 pandemi Covid-19 sudah mulai mereda sehingga usaha yang dimiliki debitur mulai berjalan kembali walaupun masih adanya batasan-batasan dan aturan dari pemerintah yang wajib ditaati. Berdasarkan standar maksimum rasio yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka rasio NPL pada tahun 2021 dapat dikategorikan tidak sehat, karena nilainya melebihi 5%.

Tabel 4 4 Perbandingan Non Performing Loan (NPL) Tahun 2019-2021

Tahun	Kredit Bermasalah	Total Kredit	%	Kategori
2019	1.397.946.478	17.660.531.437	7,91%	Tidak Sehat
2020	3.172.036.513	12.163.112.144	26,08%	Tidak Sehat
2021	2.554.463.832	13.246.677.434	19,28%	Tidak Sehat

(Sumber : Laporan Rekap Nominatif Kredit, Data diolah)

Pada tabel 3.5 diatas, menunjukkan bahwa rata-rata persentase NPL pada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cab Demak tahun 2019-2021 masih melebihi standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 5%.

Grafik perkembangan *Non Performing Loan* (NPL) dapat dilihat seperti dibawah ini:

Gambar 4.10 Grafik Perkembangan NPL Tahun 2019-2021



(Sumber : Laporan Rekap Nominatif Kredit, Data diolah)

Berdasarkan tabel 4.5 dan gambar 3.2 diatas, dapat dilihat bahwa hasil presentase NPL dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2019 NPL yang diperoleh sebesar 7,91%, kemudian pada tahun 2020 meningkat dari 7,91% menjadi 26,08%. Peningkatan presentase NPL ini

sangat signifikan dan merupakan peningkatan NPL yang tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini dipengaruhi akibat adanya pandemi Covid-19 yang melumpuhkan kegiatan usaha masyarakat sehingga debitur tidak bisa membayar angsurannya kepada bank. Dan pada tahun 2021 NPL mengalami penurunan dari 26,08% menjadi 19,28%, karena pada tahun 2021 pandemi Covid-19 sudah mulai membaik tetapi kegiatan usaha masih dibatasi dan harus tetap mematuhi aturan pemerintah, hal ini berpengaruh terhadap pendapatan debitur yang setidaknya sudah mulai berjalan kembali usahanya.

Apabila kredit yang telah disalurkan tidak bisa dilunasi oleh debitur, maka tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi kesehatan pada bank, karena semakin tinggi nilai NPL, maka bank tersebut dikategorikan tidak sehat. Karena NPL merupakan salah satu indikator penting yang bisa memberikan pengaruh besar pada suatu bank. Untuk itu, PT BPR BKK Jateng (Perseroda) cab demak tetap harus melakukan penanganan kredit bermasalah tersebut, dan melakukan upaya agar di tahun berikutnya rasio NPL bisa menurun

4.3.1 Penanganan Kredit Bermasalah yang Dilakukan oleh PT BPR BKK Jateng (Perseroda)

Penanganan kredit bermasalah bertujuan untuk mempertahankan kondisi serta meningkatkan kualitas bank, supaya bank tetap dalam keadaan seimbang dan bisa mendapatkan dananya kembali untuk bisa meningkatkan pendapatan bagi bank. Menurut hasil wawancara dengan Account Officer Kredit, penanganan kredit bermasalah pada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cab Demak untuk menekan angka *Non Performing Loan* (NPL) dapat dilakukan dengan beberapa strategi, diantaranya:

1. Penagihan

Penagihan merupakan langkah awal yang dilakukan oleh PT BPR saat debitur mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Ada beberapa cara yang dilakukan untuk melakukan penagihan, diantaranya :

a. Melakukan pendekatan persuasif kepada debitur

Seperti : Melakukan kunjungan ke rumah debitur kemudian membicarakan

penyebab terjadinya kredit bermasalah, memberitahukan kepada debitur apabila tidak membayar kewajibannya maka nama baik debitur dipertaruhkan, karena nama debitur akan merah dan tercatat dalam SLIK/BI Checking dimana di dalam SLIK terdapat *track record* debitur seperti jumlah pinjaman, status kolektibilitas kredit dan lain sebagainya sehingga apabila debitur meminjam di bank lain kemungkinan di acc nya kecil.

b. Memberi Surat Teguran

Pihak bank akan memberikan surat teguran kepada debitur yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Surat Teguran diberikan kepada debitur dari kolektibilitas Lancar menjadi Dalam Perhatian Khusus. Surat Teguran dapat diberikan berulang-ulang selama status debitur masih tergolong Dalam Perhatian Khusus

c. Memberi Surat Peringatan (SP)

Pihak bank akan memberikan surat peringatan kepada debitur agar segera membayar tunggakan pokok beserta bunganya yang sudah jatuh tempo.

- SP I diberikan kepada debitur yang mengalami penurunan kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus menjadi Kurang Lancar.
- SP II diberikan kepada debitur yang mengalami penurunan kolektibilitas Kurang Lancar menjadi Diragukan.
- SP III diberikan kepada debitur yang mengalami penurunan kolektibilitas Diragukan menjadi Macet.

2. Restrukturisasi

Merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh bank terhadap debitur yang mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran. Restrukturisasi dapat

dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu kredit, penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan pokok dan bunga kredit, penambahan fasilitas kredit.

Ada beberapa kriteria kredit yang dapat direstrukturisasi, yaitu :

1. Debitur mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran pokok dan bunga kredit.
2. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dimungkinkan mampu untuk memenuhi kewajibannya setelah kredit direstrukturisasi.
3. Debitur menunjukkan itikad baik dan bersedia untuk memenuhi kewajibannya setelah kreditnya direstrukturisasi.

3. Penjualan Aset atau Agunan

Apabila semua upaya telah dilakukan tetapi masih belum membuahkan hasil dan debitur sudah benar-benar tidak mempunyai itikad baik atau debitur tidak mampu lagi untuk melunasi kewajibannya, maka langkah terakhir yang dilakukan bank yaitu dengan menjual sendiri agunan yang menjadi jaminan kredit secara dibawah tangan jika telah ada persetujuan terlebih dahulu dari debitur, surat kuasa untuk menjual agunan secara dibawah tangan dituangkan di dalam Akta Perjanjian pada saat penerimaan kredit. Jika hal tersebut tidak membuahkan hasil, maka bank dapat melakukan pelelangan terhadap barang jaminan yang diberikan kepada bank yaitu berupa Hak Tanggungan, dimana urusan tersebut dilakukan/dilimpahkan kepada Balai Lelang.

BAB V

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dari hasil analisis kredit bermasalah menggunakan rasio NPL dari tahun 2019- 2020 yaitu sebagai berikut:

1. Selama 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2019, 2020, dan 2021 kredit bermasalah yang terjadi pada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) mengalami fluktuasi. PT BKK Jateng Cabang Demak terdapat sumber permasalahan kredit pada Produk kredit MIKRO BKK (KMB), Sumber permasalahan kredit seperti musibah atau bencana dimana sumber pendapatan debitur terkendala, sebagaimana yang terjadi saat pandemi. Kemudian, masalah perlambatan piutang pun dapat mengakibatkan kredit bermasalah. Dampak dari pandemi terhadap PT BKK Jateng Cabang Demak pada tahun 2019-2021 mengalami kredit bermasalah. Terdapat 70% nasabah UMKM yang mengalami penurunan pendapatan pada penjualannya, dikarenakan adanya pembatasan atau pengurangan jam jualan di pasar yang biasanya pasar dibuka mulai dari jam 01.00 - 17.00 WIB, kini pasar dibuka mulai jam 07.00-13.00 WIB, yang mengakibatkan pengurangan penjualan barang dagangan dan juga mengalami pengurangan pendapatan nasabah. Sehingga mengakibatkan nasabah tidak dapat membayar angsuran kredit dengan tepat waktu Dimana pada tahun 2019 jumlah kredit bermasalah yang terjadi sebesar Rp. 1.397.946.478 dengan jumlah kredit yang diberikan sebesar Rp. 17.660.531.437 dan NPL yang diperoleh sebesar 7,91%. Berdasarkan standar maksimum rasio yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka rasio NPL pada tahun 2019 dapat dikategorikan tidak sehat, karena nilainya melebihi 5%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : Kredit

yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian, contoh kredit modal kerja digunakan untuk kebutuhan konsumtif, dan sebagainya. Adanya masalah dalam keluarga debitur seperti perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, dan sebagainya. Kurangnya pembinaan dan monitoring oleh pihak bank kepada debitur.

Pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah kredit yang diberikan oleh PT BPR BKK Jateng (Perseroda), tetapi mengalami peningkatan jumlah kredit bermasalah. Jumlah kredit bermasalah pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 3.172.036.513 dengan jumlah kredit yang diberikan sebesar Rp. 12.163.112.144 dan NPL yang diperoleh sebesar 26,08%. Pada tahun ini terjadi peningkatan jumlah kredit bermasalah yang cukup tinggi dari tahun sebelumnya, yaitu meningkat sebesar Rp. 1.774.090.035. Jumlah kredit yang diberikan menurun, akan tetapi jumlah kredit bermasalahnya meningkat cukup signifikan. Berdasarkan standar maksimum rasio yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka rasio NPL pada tahun 2020 dapat dikategorikan tidak sehat, karena nilainya melebihi 5%. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan matinya roda perekonomian, usaha yang dimiliki oleh debitur bangkrut, sehingga debitur tidak mampu untuk membayar angsurannya kepada pihak bank.

Pada tahun 2021 jumlah kredit bermasalah yaitu sebesar Rp. 2.554.463.832 dengan jumlah kredit yang diberikan sebesar Rp. 13.246.677.434 dan NPL yang diperoleh sebesar 19,28%. Pada tahun ini terjadi penurunan jumlah kredit bermasalah dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp. 617.572.681. Hal ini terjadi karena pada tahun 2021 pandemi Covid-19 sudah

mulai mereda sehingga usaha yang dimiliki oleh debitur mulai berjalan kembali, walaupun masih adanya batasan-batasan dan aturan dari pemerintah yang wajib ditaati. Berdasarkan standar maksimum rasio yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka rasio NPL pada tahun 2021 dapat dikategorikan tidak sehat, karena nilainya melebihi 5%.

Berdasarkan hasil pengamatan, langkah pertama yang dilakukan PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dalam mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah adalah dengan melakukan analisis dalam menanggulangi resiko peningkatan NPL, yaitu dengan cara mengecek perkembangan debitur dilihat dari pembayaran angsuran setiap bulannya. Karena langkah pertama yang harus dilakukan untuk menilai kualitas kredit adalah dengan melihat lancar atau tidaknya debitur dalam melakukan pembayaran angsuran yang merupakan kewajiban dan tanggungjawab debitur

Adapun cara yang dilakukan oleh PT BPR BKK Jateng (Perseroda) untuk menangani terjadinya kredit bermasalah, yaitu dengan memberikan pembinaan kepada debitur, penagihan, restrukturisasi kredit, dan penjualan aset atau agunan yang diberikan oleh debitur kepada bank sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Pada saat pembinaan kredit, bank melakukan pendekatan persuasif kepada debitur supaya debitur bisa segera menyelesaikan kredit yang bermasalah tersebut. Apabila pihak bank sudah melakukan upaya untuk melakukan pendekatan tetapi debitur masih belum bisa menyelesaikan kredit bermasalahnya, maka pihak bank akan memberikan saran kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi, yaitu dengan membuat suatu perjanjian baru yang

merubah tentang besarnya angsuran pokok, suku bunga, jangka waktu kredit dan lain- lain. Apabila sudah dilakukan restrukturisasi tetapi debitur masih belum bisa membayar kewajibannya, maka langkah terakhir yang dilakukan oleh bank adalah dengan cara menjual atau melelang agunan yang menjadi jaminan kredit untuk melunasi hutang yang dimiliki debitur.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan pada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cab Demak kedepannya, maka penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Dalam melakukan analisis, PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cab Demak harus lebih cermat dan tetap menggunakan prinsip 5C serta SOP yang berlaku untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah dan kenaikan NPL pada tahun berikutnya.
2. Meningkatkan pembinaan dan monitoring kepada debitur supaya sadar akan kewajiban yang dimilikinya.
3. Hendaknya menentukan target dalam menentukan batas maksimum NPL dan meningkatkan kinerja dengan semaksimal mungkin untuk memperbaiki kualitas kredit yang dimiliki sehingga berdampak baik pada kesehatan bank agar kegiatan operasional bank tetap berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawi, H. (2011). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Darmawi, H. (2012). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Darmawi, H. (2018). *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- <https://www.ojk.go.id/kanal/perbankan/pages/bankumum.aspx19Juli2022>.
- Ismail. (2016). *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Cetakan Keempat, Jakarta : Prenamedia Group.
- Juniarto, H. (2015). *BPR Berperan Mengembangkan Ekonomi Daerah*. (https://www.kompasiana.com/heri_ponti/54f6024fa3331191178b458b/bprberperan-mengembangkan-ekonomi-daerah, diakses pada 12 Juli 2022).
- Kasmir. (2012). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2013). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Pertama. Cetakan Keduabelas. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir.(2015). *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Kep-Dir III 2022 - Produk Kredit dan Simpanan PT BPR BKK Jateng (Perseroda)
- Laporan Rekap Nominatif Kredit Kantor Kas Bumijawa (2022)
- M.Sujai. (2019). Analisis Pengelolaan Non Performing Loan PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional,Tbk Mitra Usaha Rakyat Kantor Cabang Pembantu Tolitoli. Seiko : *Journal of Management & Business*, 3(1), 1 – 12.



